

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu daerah atau wilayah dengan penduduk yang besar maupun penduduk yang kecil dan wilayah yang sempit dalam mewujudkan kesejahteraan penduduknya dilakukan melalui proses pembangunan. Dalam hal ini kualitas dari sumber daya manusia memiliki peran yang paling utama dalam pembangunan ekonomi. Manusia bertindak sebagai pelaku proses serta menjadi modal dalam pembangunan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia.¹ Oleh karena itu tinggi rendahnya IPM setiap tahun perlu diperhatikan untuk melihat pembangunan manusia pada suatu daerah.

Pembangunan merupakan sebuah upaya atau proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Proses pembangunan meliputi berbagai perubahan diberbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan suatu negara. Menurut Todaro, komponen dasar atau nilai inti keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*) dan kebebasan (*freedom*), yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap masyarakat. Menurut pandangan *The United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan pembangunan manusia sebagai sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, penghasilan dan pekerjaan.²

¹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 147

² Nur Baeti, *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*, Economics Development Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang, ISSN 2252-6889, 2013, hlm. 87

Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal. Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan adalah masyarakat karena masyarakat adalah kekayaan yang nyata pada suatu daerah atau wilayah. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu : produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.³

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.⁴ Perkembangan dari angka IPM, dapat memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah atau wilayah tertentu.⁵

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antarwilayah semakin dinamis sebagai ajang untuk kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus 2014*, BPS Kab. Kudus, 2015, hlm. 6

⁴ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2014*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2015, hlm. 10

⁵ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2013*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2013, hlm. 9

manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.⁶

Indeks Pembangunan Manusia juga dipengaruhi oleh banyak faktor terutama faktor-faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi tersebut diantaranya investasi sumber daya manusia, Produk Domestik Regional Bruto, pendapatan perkapita, kemiskinan, pengangguran, upah dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an pembangunan ekonomi dihubungkan dengan konsep *imarah al-ard* (memakmurkan bumi) yang terdapat pada QS. Hud (11): 61.

﴿وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ۝ ٦١﴾

Artinya : Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)"

Pemakmuran tanah mengandung pemahaman tentang pembangunan ekonomi. Beberapa pokok mengenai pembangunan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi. Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal dasar pembangunan nasional. Oleh karena itu, maka kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan.⁷

Dalam hukum ekonomi syari'ah terdapat kajian yang penting menyangkut keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan akhir dari adanya hukum yang mengatur ekonomi manusia Muslim, karena erat kaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan dalam pembangunan manusia yakni *maqasid al-syari'ah*.

⁶ Ibid., hlm. 6

⁷ Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015, hlm. 247-248

Dengan demikian pembangunan ekonomi yang diukur dengan hukum ekonomi Islam secara filosofis harus memegang kerangka *maqasid al-syari'ah* yang menghendaki keadilan dan kemaslahatan secara utuh. Hal ini harus diikuti oleh kerangka praktis perwujudan keadilan dan kemaslahatan itu dengan mempertimbangkan unsur-unsur penting dalam pembangunan manusia secara komprehensif yang dapat diukur dengan menggunakan teori Indeks Pembangunan Manusia seperti indeks harapan hidup (kesehatan), kelayakan hidup (ekonomi) dan pendidikan.⁸

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2015

Provinsi	IPM Jawa Tengah (Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jawa Tengah	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49

Sumber: www.jateng.bps.go.id , tahun 2018

Berdasarkan 1.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah memiliki perkembangan IPM yang positif, yang ditunjukkan dengan meningkatnya IPM selama tahun 2011 sampai tahun 2015.

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di berbagai Negara. Menurut Simanjuntak, 1992 dalam Gianie, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu upah minimum juga sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja. Upah minimum telah ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan hidup layak berupa kebutuhan akan pangan.⁹

⁸ [http://djibran.staff.ipb.ac.id/2017/03/25/islam-dan-indeks-pembangunan-manusia/Ekonomi Syariah](http://djibran.staff.ipb.ac.id/2017/03/25/islam-dan-indeks-pembangunan-manusia/Ekonomi%20Syariah), diakses pada hari Jumat 30 Maret 2018 Pukul 12.27 WIB

⁹ Rini Sulistiawati, *Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*, Jurnal EKSOS, Universitas Tanjungpura, ISSN 1693 – 9093, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012, hlm. 198

Tabel 1.2
Upah Minimum Regional
Jawa Tengah Tahun 2011-2015 (Rupiah)

Tahun	UMK
2011	675.000
2012	765.000
2013	830.000
2014	910.000
2015	910.000

Sumber : www.bps.go.id, tahun 2018 (data diolah)

Perkembangan tingkat upah minimum rata-rata regional pada tabel 1.2 menunjukkan dari tahun 2011 sampai tahun 2014 upah minimum mengalami kenaikan yang terus menerus. Kenaikan tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 90.000 tetapi pada tahun 2015 upah minimum tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, tetap pada nominal 910.000. Peningkatan upah minimum regional akan meningkatkan kehidupan hidup layak, sehingga standar hidup layak dan daya beli masyarakat juga mengalami peningkatan sehingga berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia.

Tenaga kerja dalam pembangunan mutlak diperlukan, karena mereka yang akan melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia. Pengangguran akan menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat tidak maksimal sedangkan tujuan akhir dari pembangunan yaitu untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jika tingkat pengangguran di suatu wilayah tinggi maka akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia juga tidak dapat tercukupi.

Tabel 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah 2011-2015 (%)

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jawa Tengah	7.07	5.61	6.01	5.68	4.99

Sumber: www.jateng.bps.go.id, tahun 2018 (data diolah)

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.¹⁰ Tingkat pengangguran ini dapat mempengaruhi nilai IPM. Pada Gambar 1.3 di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2011 sampai tahun 2015 jumlah pengangguran di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang fluktuatif.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.¹¹

¹⁰ Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, *Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*, Jurnal Ekonomi, Universitas Riau, No. 2, Vol. 22, 2014, hlm. 3

¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Jawa Tengah 2011-2015*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Semarang, t.th., hlm. 3

Tabel 1.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita atas Dasar Harga
Konstan 2010 di Provinsi Jawa Tengah 2011-2015

No		Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Jutaan Rupiah	658,003,645.36	690,461,017.10	726,652,111.09	763,219,714.00	805,043,118.61
2	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	Jiwa	32725378	32998692	33264339	33522663	33774141
3	PDRB perkapita	Rupiah	20.10683	20.92389	21.84478	22.76728	23.83608

Sumber: www.jateng.bps.go.id, tahun 2018 (data diolah)

Indikator kesejahteraan penduduk suatu wilayah yakni PDRB per kapita. Pertumbuhan PDRB per kapita yang tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya PDRB per kapita maka tingkat standar kelayakan hidup masyarakat dan daya beli juga meningkat. Sehingga peningkatan ini akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan 1.4 menunjukkan bahwa selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di Jawa Tengah memiliki perkembangan PDRB perkapita yang positif, yang ditunjukkan dengan meningkatnya PDRB per kapita selama tahun 2011 sampai tahun 2015.

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua Provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia).¹²

¹² Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2017 Tahun 2010*, BPS Provinsi Jawa Tengah, Semarang, t.th., hlm. 4

Menurut stasiun klimatologi kelas I Semarang, suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2016 berkisar antara 24,8°C sampai dengan 28,3°C. Tempat – tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 78 persen sampai dengan 87 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di stasiun meteorologi Purwokerto yaitu sebesar 12.170 mm dan hari hujan terbanyak tercatat di stasiun Banjarnegara sebanyak 276 hari.¹³

Berdasarkan data tabel 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2011-2015 terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2015, IPM Jawa Tengah telah mencapai 69.49. Angka ini meningkat 0,71 poin dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar 68.78.

Selaras dengan pertumbuhan IPM Jawa Tengah pada tabel 1.4 besarnya PDRB per kapita pada tahun 2011-2015 juga terus mengalami peningkatan, hal ini berbanding lurus dengan pembangunan manusia di Jawa Tengah, pembangunan manusia meningkat apabila PDRB perkapita di Jawa Tengah meningkat. Akan tetapi, pada tahun 2015, meningkatnya IPM tidak dibarengi dengan meningkatnya UMR, UMR pada tahun 2015 masih tetap sama sebesar UMR tahun 2014. IPM pada tahun 2015 menunjukkan angka 69.49 akan tetapi UMR tetap sebesar 910.000. Pada tahun 2013 kenaikan IPM juga tidak dibarengi dengan penurunan pengangguran. IPM pada tahun 2013 menunjukkan angka sebesar 68.02 akan tetapi pengangguran meningkat menjadi 6.01 atau mengalami kenaikan sebesar 0.4 dari tahun sebelumnya sebesar 5.61

Hal inilah yang menjadi kesenjangan fenomena atau kesenjangan empiris yang akan ditindaklanjuti dan menjadi fokus pada penelitian ini. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh UMR, Tingkat Pengangguran, dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 dari

¹³ *Ibid.*, hlm. 5

Perspektif Ekonomi Syariah ”. Pemilihan tahun 2011-2015 berdasarkan dengan data publikasi UMR, pengangguran, PDRB dan IPM dari BPS Jawa Tengah yang telah dipublikasikan ditahun 2017 serta karena pada tahun 2013 dan tahun 2015 terdapat masalah yang akan diteliti lebih lanjut.

B. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh pengertian yang tepat dan benar dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan suatu penegasan mengenai judul “Pengaruh UMR, Tingkat Pengangguran, dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2011-2015 dari Perspektif Ekonomi Syariah”. Adapun istilah-istilah yang penulis jelaskan dari judul diatas adalah:

1. UMR (Upah Minimum Regional)

Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 01/MEN/1999 bab I pasal 1 tentang Upah Minimum, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum yang berlaku sektoral di daerah Kabupaten menurut wilayah pembangunan daerah disebut dengan upah minimum sektoral regional tingkat II. Upah minimum ditetapkan berdasarkan standar layak hidup dengan memperhatikan produktivitas pertumbuhan ekonomi.¹⁴ Baik pekerja tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan upah yang diberikan oleh pengusaha serendah rendahnya sebesar upah minimum yang berlaku. Untuk pekerja dengan sistem kerja borongan atau satuan hasil yang dilaksanakan 1 bulan atau lebih upah rata-rata sebulan juga harus serendah rendahnya sebesar upah minimum. Sedangkan untuk upah pekerja harian lepas, ditetapkan secara upah bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari yang dibagi dengan 25 untuk perusahaan dengan sistem kerja 6 hari dan dibagi dengan 21 untuk sistem kerja dengan waktu 5 hari.¹⁵

¹⁴ Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 172-173

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 178

2. Tingkat Pengangguran

Menurut Sadono Sukirno pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Sedangkan seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak digolongkan sebagai penganggur.¹⁶

Tingkat pengangguran (*unemployment rate*), yaitu jumlah penganggur dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja (*labor force*).¹⁷

3. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.¹⁸

4. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau dikenal dengan sebutan *Human Development Index* (HDI) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah.¹⁹ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.²⁰

¹⁶ Nur Baeti, *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*, Economics Development Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang, ISSN 2252-6889, 2013, hlm. 92

¹⁷ Zarkasi, *Pengaruh Pengangguran terhadap Daya Beli Masyarakat Kalbar*, Jurnal Khatulistiwa, No. 1, Vol. 4, 2014, hlm. 49

¹⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Jawa Tengah 2011-2015*, Loc., Cit.

¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2013*, Loc., Cit.

²⁰ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2014*, Loc., Cit.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian, rumusan masalah secara jelas akan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Adapun dalam penelitian ini, penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah UMR berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 dari perspektif Ekonomi Syariah ?
2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 dari perspektif Ekonomi Syariah ?
3. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 dari perspektif Ekonomi Syariah ?
4. Apakah UMR, pengangguran, dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 dari perspektif Ekonomi Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh UMR, terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 dari perspektif Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran, terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 dari perspektif Ekonomi Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB, terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 dari perspektif Ekonomi Syariah.

4. Untuk mengetahui pengaruh simultan UMR, pengangguran, dan PDRB pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 dari perspektif Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya mengenai Indeks Pembangunan Manusia.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama.
 - c. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengaruh UMR, tingkat pengangguran, PDRB, terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2010-2015 dari perspektif Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan informasi bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan manusia di Jawa Tengah dan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan manusia.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah menyangkut Indeks Pembangunan Manusia sehingga dapat menjadikan kebijakan yang efektif.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika ini dimaksudkan sebagai gambaran umum yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ke dalam tiga bagian secara besar, yaitu :

1. Bagian Awal

Pada bagian ini memuat halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan,

halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar bagan.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, desain dan definisi operasional variabel penelitian, teknik analisis data, uji asumsi klasik dan statistik.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, teknik analisis data, analisis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran.